



KONSEPSI PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN

Dudung Darusman
(Guru Besar Madya Fakultas Kehutanan IPB)

*Disampaikan sebagai Bahan Kulliah Diklat Manajer HPH Bina Desa Hutan,
Fakultas Kehutanan IPB, tanggal 13 Desember 1986*

PENDAHULUAN

Indonesia sekarang memiliki penduduk kira-kira 190 juta jiwa, dengan pendapatan per jiwa rata-rata masih rendah, yakni sekitar US \$ 800 per tahun, atau kurang lebih Rp. 1,85 juta per tahun. Sebagian penduduk Indonesia berpendapatan tinggi atau kaya, namun sebahagian lainnya berpendapatan rendah atau tergolong miskin. Penduduk miskin di Indoensia masih cukup tinggi jumlahnya, yakni sekitar 27 juta jiwa, yang sebahagian besar bertempat-tinggal di pelosok-pelosok daerah, yang terutama berada dekat/sekitar hutan.

Setiap kegiatan pembangunan apapun, termasuk di bidang kehutanan, harus dapat mengentaskan kemiskinan penduduk Indonesia tersebut. Kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, yang sangat berdekatan dengan tempat tinggal penduduk miskin tersebut, harus lebih bertanggung jawab dan mau memasukkan upaya pengentasan kemiskinan tersebut ke dalam setiap kegiatan usahanya. Hal ini juga karena sumberdaya hutan merupakan bahagian sumberdaya lahan yang sangat luas, yakni kira-kira 143 juta Ha atau lebih dari 70 % dari daratan Indonesia (190 juta Ha). hutan dengan luasan sebesar itu, sebagai sumberdaya ekonomi bagi Bangsa Indonesia, harus dapat lebih memberikan dampaknya bagi kemajuan masyarakat di sekitarnya.

Bagaimana suatu kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kehutanan, dapat memberikan dampaknya terhadap pembangunan seluruh masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dipelajari dalam ilmu ekonomi pembangunan wilayah. Khusus dalam hal kegiatan kehutanan dapat kita pelajari mengenai pembangunan wilayah pedesaan.

MANFAAT PEMBANGUNAN YANG DIHARAPKAN

Bagi masyarakat, kegiatan pembangunan diharapkan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

a. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja bagi seseorang merupakan sesuatu yang memberikan arti pada kehidupannya, karena akan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan

perannya, merasa berguna, sehingga memiliki harga diri. Ahli filsafat mengatakan bahwa kalau ingin memberikan kebahagiaan kepada seseorang berilah dia pekerjaan.

b. Pendapatan atau penerimaan

Pendapatan atau disebut income, yang berasal dari gaji/upah, akan memberi seseorang kekuatan untuk membeli (daya beli) dan mengkonsumsi barang dan jasa yang diperlukannya agar dia, dan mungkin keluarganya, dapat hidup layak. Bahkan dari pendapatan itu pula dia dapat menabung untuk membina sumber-sumber penerimaan yang lebih besar.

c. Kesempatan berusaha

Kesempatan berusaha adalah sesuatu yang lebih diharapkan lagi oleh masyarakat, karena di samping akan memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya, juga kesempatan kerja dan pendapatan bagi sesama yang lain.

d. Transfer IPTEK dan Manajemen

Alangkah diharapkannya, apabila suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah dapat juga memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam hal IPTEK dan manajemen kepada masyarakat luas di wilayah tersebut. Pengetahuan dan pengalaman baru tersebut dapat memberi motivasi bagi masyarakat untuk semakin maju lagi di kemudian hari, dan membentuk pola kehidupan yang lebih baik.

Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari kegiatan pembangunan yang diharapkan masyarakat suatu wilayah. Namun manfaat-manfaat tersebut di atas sudah cukup untuk menggambarkan harapan masyarakat luas dari suatu proses pembangunan.

CARA-CARA MASYARAKAT MEMPEROLEH MANFAAT PEMBANGUNAN

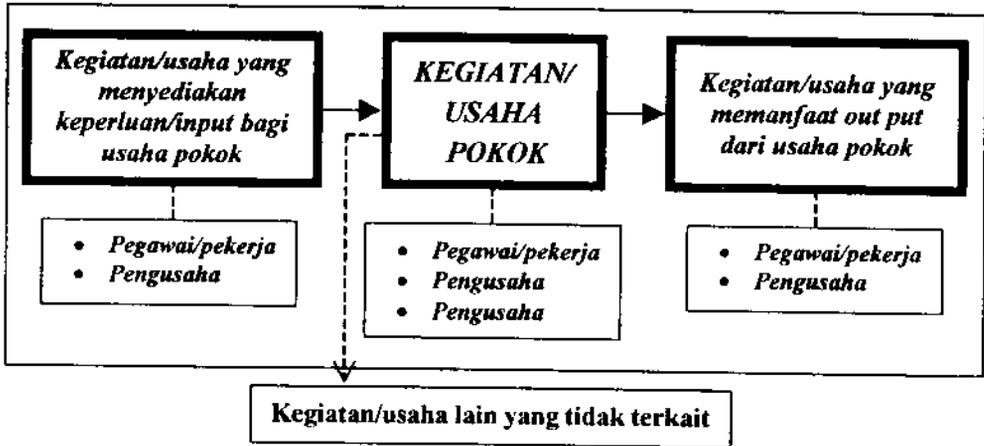
Untuk dapat memperoleh manfaat-manfaat pembangunan ekonomi seperti diuraikan di atas, masyarakat luas dapat diberi kesempatan melalui cara-cara sebagai berikut.

1. **Terlibat langsung** dalam kegiatan usaha/pembangunan yang pokok, misalnya dalam kehutanan kegiatan usaha HPH, HPHTI, industri hasil hutan, dan lain-lain. Keterlibatan tersebut dapat melalui 3 cara, yaitu :
 - a. Sebagai pekerja atau pegawai suatu perusahaan
 - b. Sebagai pemilik saham perusahaan
 - c. Sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan
2. Terlibat dalam kegiatan usaha/pembangunan yang menyediakan keperluan-keperluan dari kegiatan usaha yang pokok, misalnya yang menyediakan bahan makanan, bahan bakar, bibit, usaha angkutan, dll untuk suatu HPHTI. Dalam

kegiatan ini seseorang dapat menjadi pengusahanya atau juga sebagai pekerja/pegawai. Kegiatan usaha terkait yang bersifat menunjang keperluan-keperluan dari usaha pokok ini disebut sebagai keterkaitan ke belakang atau "backward linkages"

3. Terlibat dalam kegiatan usaha/pembangunan yang menggunakan hasil-hasil dari usaha pokok, seperti misalnya usaha penggergajian, kerajinan, dll yang menggunakan kayu atau hasil dari suatu HPH. Dalam kegiatan ini juga seseorang dapat menjadi pengusahanya atau juga menjadi pekerja atau pegawai. Kegiatan terkait yang bersifat memanfaatkan hasil usaha pokok lebih lanjut disebut keterkaitan ke depan, atau "forward linkages".
4. Mendapat bantuan dari pemilik usaha pokok untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi atau sumber-sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Sebagai ilustrasi bagaimana suatu usaha pembangunan memberi dampak bagi pembangunan masyarakat di suatu wilayah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Melalui cara-cara tersebut di atas masyarakat suatu wilayah dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan pembangunan. Semakin besar keterlibatan langsung dan tidak langsung masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, semakin baik nilai kegiatan pembangunan tersebut. Perluasan dampak dari suatu kegiatan pembangunan diukur oleh suatu ukuran yang disebut efek pengganda atau "multiplier effect". Nilai efek pengganda yang tinggi menunjukkan nilai yang baik.

Perlu disadari bahwa suatu kegiatan usaha/pembangunan pokok tertentu yang memberi efek penggandaan yang tinggi atau berdampak positif besar akan disenangi, dipertahankan dan dipelihara oleh seluruh masyarakat di suatu wilayah, dan sebaliknya.

Secara umum, keterlibatan masyarakat semakin dekat terkait dengan kegiatan usaha pokok akan memberi dampak yang lebih besar dan lebih terjamin keterlanjutannya. Oleh karena itu program/usaha berbagai pihak, termasuk para pengusaha dalam rangka membangun masyarakat desa sekitar hutan seharusnya memiliki bentuk-bentuk kegiatan yang lebih dekat terkait dengan usaha kehutanan

yang pokok, atau bahkan merupakan bagian yang terpadu dengan kegiatan usaha yang pokok tersebut.

Khusus dalam hal program HPH Bina Desa Hutan, yang seringkali tidak atau kurang terkait dengan usaha kehutanan yang pokok, perlu disadari bahwa peranannya dalam mengembangkan masyarakat lokal akan sangat tergantung pada pilihan kegiatan-kegiatan yang tepat, serta kesungguhan pelaksanaannya. Pilihan yang tepat sesuai dengan kondisi-kondisi dan harapan masyarakat, serta pelaksanaannya yang sungguh-sungguh akan dapat memberi dampak atau hasil yang maksimal dari program HPH-BDH ini. Sebaliknya program yang ditentukan secara kaku disertai pelaksanaan yang asal ada akan mengakibatkan program HPH-BDH ini menjadi percuma atau mubadzir.

PENTINGNYA PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN

Kegiatan pembangunan yang dapat memberi efek pengganda yang cukup kepada masyarakat suatu wilayah akan membuat masyarakat suatu wilayah akan membuat masyarakat tersebut, khususnya di pedesaan, tumbuh seimbang dan serasi dengan pertumbuhan usaha yang pokok (misalnya HPH, HPHTI, industri, dsb) yang ada di wilayah tersebut. Di antara macam-macam program yang dapat dilakukan, program HPH-BDH dapat memberikan tambahan efek pengganda, apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti telah dikemukakan di atas.

Sebaliknya usaha pokok yang tidak memberikan efek pengganda yang cukup, atau dirasakan terlalu rendah, akan menimbulkan bahaya atau gangguan yang sangat tidak diharapkan, baik oleh perusahaan pokok maupun oleh seluruh masyarakat, yakni sekurang-kurangnya melalui 2 jalan :

- a. **Gangguan akibat adanya kesenjangan antara masyarakat dengan para pengusaha/pegawai/pekerja perusahaan pokok, akibat rendahnya pendapatan dan pengangguran.** Sementara pendapatan rendah, rangsangan pola konsumsi terbawa tinggi karena melihat pola konsumsi lingkungan perusahaan pokok yang lebih sejahtera. Hal tersebut dalam banyak keadaan akan menimbulkan berbagai bentuk kejahatan yang merusak masyarakat dan juga termasuk lingkungan perusahaan pokoknya sendiri.
- b. **Masyarakat yang terbiasa menganggur serta konsumsi yang tidak teratur akan menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang rendah dalam menghasilkan produk, baik dalam jumlah maupun mutunya.**

Dari uraian di atas, tanggung jawab para pengusaha untuk ikut membangun wilayah pedesaan melalui program-program tertentu, termasuk HPH-BDH, IDT, dll, tidak hanya membantu masyarakat sekitar, tapi juga kembali untuk kepentingan dirinya sendiri agar perusahaannya terus berkelanjutan.

KRITERIA PENILAIAN PERUSAHAAN DARI KEPENTINGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Sebagai tambahan pengetahuan, dapat dikemukakan kriteria untuk mengukur seberapa pentingnya suatu kegiatan usaha untuk tetap dipelihara dan dipertahankan oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa. Apabila dari penilaian kriteria tersebut

ditemukan angka-angka yang terlalu rendah, maka kegiatan usaha tersebut akan dihapus atau dihentikan. Pada dasarnya kriteria yang dimaksud adalah yang menyangkut sejauh mana tingkat efisiensi dari berbagai aspek, yakni sebagai berikut.

- a. Efisiensi **perusahaan** :
 - a.1. produktivitas fisik : penurunan tingkat limbah
 - a.2. efisiensi ekonomi : peningkatan daya kompetitif
 - a.3. efisiensi finansial : peningkatan keuntungan
- b. Efisiensi **ekonomi nasional** :
 - b.1. peningkatan penerimaan pemerintah
 - b.2. peningkatan GNP dan lapangan kerja dan sektor ybs.
 - b.3. distribusi/penyebaran pendapatan, lapangan kerja dan kesempatan usaha
 - b.4. peningkatan dan penyeimbangan struktur industri hulu sampai hilir
 - b.5. pertumbuhan dan penyeimbangan pembangunan antar daerah
- c. Pemeliharaan kapasitas **lingkungan hidup** : hidrologi, atmosfer, kesuburan tanah, dll.
- d. Pemeliharaan **keragaman hayati** (biodiversity) : ketersediaan sumber genetik bagi kesejahteraan generasi yang akan datang.

Kemajuan atau keberhasilan suatu kegiatan pembangunan diukur oleh berbagai aspek efisiensi yang sangat penting seperti tersebut di atas. Apabila sebahagian dari aspek-aspek tersebut tidak diperhatikan atau dibiarkan rendah, maka kegiatan pembangunan tersebut tidak akan berdampak pembangunan wilayah yang baik, yang pada akhirnya masyarakat akan menyisihkan atau meniadakannya.

PENUTUP

Bangsa Indonesia selama kurang lebih 25 tahun terakhir telah dengan ikhlas dan rela memberi kesempatan kepada para pengusaha kehutanan (HPH, HPHTI dan Industri Hasil Hutan) untuk memanfaatkan sumberdaya hutan yang sangat besar, walaupun telah ternyata bahwa dampak pembangunan wilayahnya tidak atau belum sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu untuk 25 tahun ke depan, sudah seharusnya semua perusahaan kehutanan betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan program-program yang dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan wilayah, terutama pedesaan di sekitar hutan.

Untuk itu sangat diperlukan pimpinan dan pegawai perusahaan yang betul-betul mengerti dan berdedikasi terhadap kepentingan pembangunan wilayah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Bangsa Indonesia.

Lampiran.

INVENTARISASI JENIS-JENIS USAHA DALAM WILAYAH

Usaha terkait ke Belakang :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- dst.

Usaha Pokok Kehutanan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- dst.

Usaha terkait ke Depan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- dst.

Usaha Pokok Kehutanan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- dst.

PRINSIP ANALISIS PRIORITAS PEMBINAAN

Kegiatan Usaha	Skor Kepentingan					Prioritas
	Politik	Ekonomi/ Finansial	Sosial	Budaya	Jml	
I. Usaha pokok :						
1.						
2.						
dst.						
II. Usaha terkait kebelakang :						
1.						
2.						
dst.						
III. Usaha terkait ke depan :						
1.						
2.						
dst.						
IV. Usaha tidak terkait :						
1.						
2.						
3.						
dst.						